

ABSTRAK

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut (ASN) memegang peran strategis sebagai tulang punggung pemerintahan yang menggerakkan roda kebijakan publik hingga ke tingkat paling operasional. Di dalamnya, pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada pada posisi kunci karena mereka bukan saja mengelola sumber daya dan proses administrasi, tetapi juga menerjemahkan visi pembangunan menjadi keputusan, program, dan layanan yang menyentuh masyarakat luas. Oleh sebab itu, orientasi nilai yang memandu cara pandang, cara kerja, dan cara memutuskan pejabat struktural menjadi faktor penentu mutu kebijakan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa adalah sumber nilai yang seharusnya menjiwai seluruh proses tersebut. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional seharusnya menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk dalam tata kelola birokrasi. Metode penelitian menggunakan hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam pengaturan hukum kepegawaian, belum secara jelas menjelaskan terkait kewajiban pejabat struktural PNS secara khusus, hanya saja dalam pengaturan terkait seperti PP Disiplin PNS hanya mengatur kewajiban PNS secara umum. Begitu juga di dalam UU ASN, menjadikan Pancasila sebagai nilai dasar dan pedoman etis. Keberadaan Pancasila sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, sehingga peran Pejabat Struktural PNS sebagai policy maker dalam mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila di setiap kebijakan yang ia buat dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang berkeadilan, oleh karena itu disusunlah Rekonstruksi kebijakan yang mengikat kepada Pejabat Struktural PNS, Untuk memastikan implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan tugas pejabat struktural PNS berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan suatu mekanisme pengawasan dan evaluasi yang bersifat terukur dan obyektif.

Kata kunci: Pancasila, Pejabat Struktural, Kebijakan.

ABSTRACT

In the Indonesian state system, Civil Servants, hereinafter referred to as (ASN), play a strategic role as the backbone of government, driving public policy down to the most operational level. Within it, structural officials of the Civil Service (PNS) hold key positions because they not only manage resources and administrative processes, but also translate the development vision into decisions, programs, and services that impact the wider community. Therefore, the value orientation that guides the way structural officials view, work, and make decisions becomes a determining factor in the quality of policies. In the Indonesian context, Pancasila as the nation's ideology and philosophy is the source of values that should permeate the entire process. Pancasila, as the foundation of the state and national ideology, should serve as the basis for every development policy, including in bureaucratic governance. The research method uses normative law. The approach used is a legislative approach (*statute approach*) as well as a conceptual approach (*conceptual approach*). The results of this study indicate that the legal regulations for civil servants do not clearly specify the obligations of structural civil servant officials in particular. While regulations such as Government Regulation on Civil Servant Discipline only address the general obligations of civil servants. Similarly, in the ASN Law, Pancasila is made the basic value and ethical guideline. The existence of Pancasila is very important in the life of Indonesian society, so the role of civil servant structural officials as policy makers in implementing Pancasila values in every policy they create can create a just bureaucratic environment. Therefore, a policy reconstruction binding on civil servant structural officials was compiled. To ensure the

consistent and sustainable implementation of Pancasila values in the performance of civil servant structural officials' duties, a measurable and objective monitoring and evaluation mechanism is needed.

Keywords: Pancasila, Structural Officials, Policy.